

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PUSAT PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KREATIVITAS MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

Ferdyansyah Wicaksono, R Hari Bustomi

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pasundan

Ferdyansyah447@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pasundan

hari.bustomi@unpas.ac.id

Abstract

This article describes the collaborative implementation of a policy that involves different stakeholders in achieving goals, primarily related to community empowerment through the development of inclusive economic and creativity facilities. Through collaborative governance, it is present as a forum for mutual interaction between policy actors in building commitment and cooperation through their roles so that the positive goals of each party are achieved. In this case, it is emphasized through the “ABCGM” pattern that connects the government, private sector, universities, the media, and the community as a foundation in building synergy so that this pattern provides conditions that describe the respective roles between actors and their authorities and even obstacles between actors in building collaboration. . The research method uses a descriptive qualitative approach through data collection techniques of observation, interviews and documentation. This article concludes that the inter-institutions involved in implementing a policy need to be accompanied by commitment as a continuous process of building trust so that collaborative action is able to accommodate the interests and goals of all parties and is inclusively felt by all parties.

Keywords: Collaborative Governance, Creative Economy, Co-Working Space.

I. Pendahuluan

Menurut hasil riset Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 922,59 miliar rupiah atau sebesar 7,44 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional bersumber dari sektor ekonomi kreatif. Namun hasil tersebut belum memenuhi target di mana capaian PDB industri kreatif sesungguhnya diharapkan mencapai sekitar 5,21 %

tetapi baru tercapai 4,95% serta capaian sasaran pembangunan ekonomi kreatif yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 dengan target 12 % baru terealisasi 7,44 % tahun 2016. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2018-2025 dengan harapan terwujudnya kerangka strategis jangka panjang pengembangan ekonomi kreatif

nasional yang terintegrasi dan kolaboratif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seperti salah satu daerah di Indonesia yang bertempat di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung. Kota Bandung telah dikenal sebagai Kota Kreatif karena banyak terdapat pelaku ekonomi kreatif yang berkembang diseluruh sektor produksi seperti kuliner, destinasi wisata, musik, *fashion*, dll yang memiliki *value added* amat tinggi sehingga mampu berdaya saing di pasar lokal maupun mancanegara. Status Kota Bandung yang dikenal Kota Kreatif juga dipertegas dengan dinobatkannya Kota Bandung pada tahun 2015 oleh UNESCO sebagai anggota UNESCO *Creative Cities Network* dengan predikat kota kedua terdaftar dari 47 kota dari 33 negara di dunia.

Program Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat (Ruang Kerja Bersama atau *Co-Working Space*) sebagai wadah berkumpulnya para pelaku ekonomi kreatif untuk sebagai saluran diskusi untuk merancang, menentukan ide gagasan dalam upaya mengembangkan bisnisnya yang disesuaikan dengan potensi dari setiap kecamatan di Kota Bandung secara strategis untuk mendorong kemajuan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan. Langkah strategis ini juga telah tertuang dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 Nomor 16 tentang Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat (Ruang Kerja Bersama) per-kecamatan.

Hadirnya program pembangunan *co-working space* sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif di

setiap wilayah kecamatan di Kota Bandung dapat menjadi wadah *networking* untuk menjalin hubungan lintas sektor antara pemerintah sebagai sektor publik, dunia usaha sebagai sektor privat serta berbagai elemen komunitas masyarakat yang berjejaring secara kolektif membentuk pola kemitraan sebagai kombinasi struktur dalam tubuh sektor publik dalam bentuk kerja sama antar lembaga lintas sektor dalam kerangka sinergitas berbagai *stakeholders* dunia usaha dan ekonomi kreatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara deskriptif terkait bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat melalui aktivasi Ruang Kerja Bersama (*Co-working Space*) di Kota Bandung serta faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan yang muncul dalam proses kolaborasi saat mengimplementasikan program.

Collaborative Governance hadir sebagai respons atas pembaruan paradigma *governance* amat menitik beratkan hadirnya keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam usaha mencapai tujuan bersama. Menurut Ansell and Gash (2007:544) mendefinisikan *collaborative governance* adalah:

“sebuah pemerintahan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik

atau mengelola program atau aset publik”.

Kemudian pendapat tersebut didukung oleh Emerson et.al (2011:2) yang mengemukakan *collaborative governance* sebagai berikut:

“proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batasbatas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika dilakukan satu pihak saja”.

Nabatchi and Balogh (2011) menggambarkan terdapat tiga dimensi yang berindikator proses *collaborative governance* yang saling berkaitan antara lain:

1. *System Context*

System Context dapat memengaruhi dinamika dalam kinerja kolaborasi dalam proses *collaborative governance* sehingga membuka suatu peluang baru untuk menghadirkan tantangan yang terduga pada masa yang akan datang. *System Context* juga dapat mendorong atau bahkan menghambat kerja sama antara aktor *stakeholder* maupun antara lembaga dengan pemangku kepentingan. Dari *System Context* ini muncul ruang kendali seperti berikut:

a. Kepemimpinan (*leadership*)

Kehadiran peran kepemimpinan diidentifikasi

sebagai pengelola sumber daya dalam mewujudkan *collaborative governance* dengan berkomitmen secara kolaborasi dalam memecahkan masalah. Pemimpin terkait konteks sistem ini memulai upaya kolaboratif dengan penyediaan staf dan sumber daya lainnya untuk memperkuat upaya adanya tekanan antar *stakeholder* dan ketidakpastian kondisi dan ketergantungan antar aktor.

b. Konsekuensial Insentif (*consequential incentives*)

Hal ini mengacu kepada penggerak internal (kebutuhan sumber daya) dan eksternal (krisis situasional, ancaman dan peluang) untuk melakukan kolaborasi. Hadirnya insentif baik positif atau negatif harus ada pendorong bagi para pemimpin dengan antar aktor untuk terlibat kolektif bersama.

c. Interdependensi (*interdependence*)

Setiap individu dalam organisasi tidak dapat mencapai tujuannya dengan sendiri melainkan adanya kolaborasi sebagai insentif konsekuensial utama. Ketika organisasi publik tidak berhasil mengatasi masalah publik dengan kekuatan sumber dayanya sendiri maka menjangkau antar lembaga dan sektor menjadi opsi yang diperlukan.

d. Ketidakpastian (*uncertainty*)

Ketidakpastian dalam masalah publik menjadi peluang apabila dikelola melalui sekelompok yang berkolaborasi. Melalui kerangka kerja integratif yang menunjukkan kolaborasi lintas sektor dalam hal pengambilan keputusan yang didasari kesamaan ketidakpastian kolektif dalam mengelola masalah sosial yang berkaitan dengan *driver* untuk mengubah arah respons kompetisi menjadi kerja sama (Emerson, Nabatchi dan Balogh, 2011).

2. *Collaborative Dynamics*

Proses kolaborasi sebagai urutan linear yang dihasilkan dari waktu ke waktu secara kognitif dalam pengaturan arah implementasi. Dinamika kolaboratif memosisikan sebagai alur interaksi siklus yang didukung oleh komponen-komponen yaitu:

a. Keterlibatan berprinsip (*principled engagement*)

Keterlibatan berprinsip melibatkan *stakeholder* yang berbeda pada titik kepentingan, latar belakang, tujuan relasi, kelembagaan, sektoral masing-masing kinerja dalam menyelesaikan masalah. Berprinsip ini dimaksudkan sebagai dasar praktik komunikasi terbuka, inklusif yang diinformasikan oleh

perspektif antar aktor yang terlibat untuk menciptakan dan memperkuat motivasi bersama ketika membangun kapasitas yang dibutuhkan dalam aksi bersama.

b. Motivasi bersama (*shared motivation*)

Mencakup elemen-elemen yaitu *mutual trust*, *mutual understanding*, *internal legitimacy*, dan *shared commitment* untuk memperkuat proses kolaboratif yang mengarah pada ikatan komitmen untuk melintasi batas organisasi, sektoral yang dikhawatirkan memecah komitmen motivasi pada jalur bersama sebagaimana yang menjadi faktor kunci dinamika kolaboratif.

c. Kapasitas untuk aksi bersama (*capacity for joint action*)

Kapasitas untuk aksi bersama dimaksudkan sebagai wadah kombinasi antara pengaturan prosedural kelembagaan, kepemimpinan pengetahuan, dan sumber daya. Sehingga menghasilkan kapasitas baru untuk aksi bersama dengan mempertahankan suatu kapasitas dalam mencapai tujuan bersama sebagaimana yang terdapat dalam lingkup dimensi fungsional dalam pencapaian tujuan kolaboratif.

3. *Collaborative Actions*

Tindakan kolektif sebagai mitra kolaborasi

dalam kerangka kerja menjadi perhatian yang terbatas secara efektif dalam mekanisme *collaborative governance*. Tindakan kolektif dilakukan oleh mitra antar aktor dalam langkah kebijakan melalui arahan rekomendasi jika tujuan bersama dalam pengambilan tindakan tidak dibuat eksplisit.

a. Dampak (*impacts*)

Dampak sebagai bentuk perubahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam konteks sistem mencakup nilai dari sistem sosial atau inovasi teknologi yang

dikembangkan melalui tindakan kolaboratif yang bersifat kumulatif dan berjangka panjang secara luas.

b. Adaptasi (*Adaptions*)

Proses adaptasi terjadi kebanyakan secara tidak langsung sebagai akibat yang timbul adanya perubahan konteks sistem sebagai akibat terhadap efektivitas tindakan yang berdampak amat dirasakan untuk mengubah konteks masalah dan situasi menjadi suatu peluang untuk membantu menggerakkan masyarakat.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bandung, Pemerintah setiap Kecamatan seluruh Kota Bandung dan Lembaga *The Local Enabler* (TLE) yang berasal dari Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer sebagai data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan sebagai narasumber penghasil data yang dibutuhkan.
2. Data Sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen-

dokumen yang digunakan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal serta media massa yang topiknya relevan dengan tujuan penelitian.

Penentuan informan penelitian ini melalui teknik *sampling* yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* yang dibarengi dengan informan terpilih untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang memiliki data yang dapat melengkapi penelitian, maka penelitian juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara mendalam
2. Observasi
3. *Literatur review*

Mengenai validitas data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan dengan teknik triangulasi sumber untuk meastikan keabsahan data dengan

mengsinkronisasi data sejenis dari beberapa sumber informasi data yang digali. Maka dilakukanlah analisis data dengan komponennya meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan yang mengacu kepada teknik analisis data model Miles and Huberman.

III. Hasil dan Pembahasan

a. *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat di Kota Bandung

1. *System Context*

a) **Kepemimpinan** (*Leadership*)

Pemerintah Kota Bandung melalui Bappelitbang dan Disbudpar sebagai *leading sector* utama dalam pelaksanaan aktivasi *co-working space* mengedepankan sinergitas yang dibangun dengan lembaga perguruan tinggi melalui hasil kajiannya yang kami ambil sebagai rekomendasi pelaksanaan lalu sinergitas dengan pihak swasta, dengan memanfaatkan kekurangan dan kelebihan yang sama-sama dipunya seperti kami hanya memfasilitasi pendampingan secara non-fisiknya saja terutama pengembangan kualitas produk, pemasaran, manajemen keuangan, dll yang di masyarakat sebagai peserta sementara untuk penyediaan ruangnya kami kerja sama kan dengan swasta dan BUMN untuk penyediaan tempat proses pendampingannya sehingga dapat menarik perhatian

Fokus penelitian yang akan dikaji yaitu tentang *collaborative governance* melalui pendekatan dimensinya dalam proses pengembangan masyarakat berbasis ekonomi kreatif di Kota Bandung ditentukan oleh *System Context*, *Colaborative Dynamics*, dan *Collaborative Actions*.

masyarakat lebih untuk turut berpartisipasi dalam upaya aktivasi *co-working space* serta fasilitasi akses pembiayaan kepada pelaku usaha yang terlibat aktivasi.

b) **Insentif Konsekuensial** (*Consequential Incentives*)

Proses kolaborasi yang telah terbangun antara Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan menggandeng sektor privat atau usaha lainya serta beberapa BUMN yang kemudian menghibahkan dana nya melalui bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).

c) **Saling Ketergantungan** (*Interdependence*)

Melalui peran pemerintah sebagai penanggung jawab pendampingan dan pelatihan untk meningkatkan kapabilitas masyarakat yang menjadi peserta, lalu swasta berperan untuk penyediaan hal-hal fisik berupa ruangan tempat dan akses biaya serta mengkoneksikan dengan pemasaran produk secara luas, kemudian dengan pihak akademisi melalui program PKM dan penelitiannya khususnya terkait ekonomi kreatif yang menjadi rujukan rekomendasi pelaksanaan hingga dengan

komunitas masyarakat disetiap kecamatan untuk sama-sama memetakan potensi wilayahnya.

**d) Ketidakpastian
(*Uncertainty*)**

Disbudpar serta Bappelitbang lebih mempersiapkan sebagai antisipasi hambatan-hambatan yang ada sebagai akibat dari kondisi ketidakpastian dengan lebih adaptif ketika memberi pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang terlibat di ruang *co-working space*. Kondisi ketidakpastian secara global yang berdampak kepada seluruh pelayanan menjadi virtual nyatanya belum diimbangi dengan kapabilitas masyarakat sebagai peserta untuk adaptif menggunakan *platform* yang tersedia.

2. Collaborative Dynamics

**a) Keterlibatan Berprinsip
(*Principled Engagment*)**

Aspek ini mendorong lahirnya kelompok kerja yang lebih kepada komunitas masyarakat dan lembaga masyarakat seperti Karang Taruna, Padepokan kesenian dan pelaku usaha menengah untuk ambil bagian mengelola ruang ini secara bersama dimana pemerintah melalui pemerintahan kecamatan setempat hanya sebagai *controlling* serta menyiapkan modul sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan ekonomi dan kreativitas masyarakat karena sudah menjadi prinsip tanggung jawab.

b) Motivasi Bersama (*Shared Motivation*)

Saling kebutuhan satu sama lain serta peran-peran aktor yang terlibat saling melengkapi sebagai komitmen nyata ketika bertindak dilapangan menjadi modal membangun kepercayaan antar sesama *stakeholder* secara sinergis juga dengan masyarakat disamping memiliki kebutuhan akan penghidupan yang layak secara ekonominya maka kami berikan pmdampingan melalui ruang kolaboratif untuk memproduktifkan mereka dengan harapan mewujudkan pemulihan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menjadi motivasi besar bersama.

c) Kapasitas untuk Aksi Bersama (*Capacity for join action*)

Sinergitas antar *stakeholder* melalui siklus organisasi pada kelompok kerja diantara Pemerintah melalui Disbudpar, organisasi non-pemerintah *the local enabler* memiliki kapasitas secara non-fisik dan terkait pengawasan dan penilaian aktivasi dengan kerja sama yang dipasarkan melalui *platform* digital dengan jaminan perlindungan terkait HAKI-nya sebagai langkah nyata mengimplementasikan program tersebut untuk mencapai tujuan yang efektif.

3. Collaborative Actions

a) Dampak (*Impacts*)

Dampak dari segi pengetahuan, yakni bertambahnya wawasan peserta melalui pembelajaran dan pendampingan menjadi tahu akan manajemen produk dan pemasaran dan tereduksi akan pentingnya ke orisinalitas produk. Selain itu, berdampak kepada pengoptimalan penggalan potensi dari setiap wilayah kecamatan yang kemudian dikembangkan dan diberdayakan menjadi suatu komoditas yang dikenal menjadi identitas wilayahnya yang berdaya tarik kepada khalayak banyak.

b) Adaptasi (*Adaptions*)

Seiring berjalanya program yang didukung oleh penguatan secara kelembagaan antar aktor yang terlibat, pembaharuan teknologi sebagai alat berjalanya program dan pengaktualisasian sumber daya penggerak menjadi tiga kunci utama dalam menjalankan sikap adaptif sehingga para aktor juga memiliki pola pikir *thinking ahead* yaitu berpikir ke arah masa depan sehingga mampu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang akan terjadi untuk kemudian mempersiapkan antisipasinya sejak se-dini mungkin.

b. Hambatan-Hambatan *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat di Kota Bandung

Adapun tindakan *collaborative governance* yang diimplementasikan terkait pengembangan pusat pemberdayaan ekonomi dan kreativitas masyarakat melalui aktivasi *co-working space* atau ruang kerja bersama nyatanya tidak luput dari hambatan yang dialaminya, maka dari itu terdapat beberapa hambatan yang ada diantaranya sebagai berikut:

1. Kesulitan memetakan persebaran usia produktif yang ada dalam setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandung yang nantinya akan menjadi sasaran peserta yang terlibat untuk diberdayakan.
2. Pendanaan yang tidak bisa terlalu bergantung kepada APBD dan hanya mengandalkan CSR pihak swasta, karena CSR dirasa teralu insidental serta hanya bersifat komersil bagi perusahaan saja sehingga tidak berkelanjutan.
3. Keterbatasan hal teknis yang dialami peserta utamanya terkait kondisi pandemi saat ini yang mengharuskan aktivitas secara daring, seperti kurang cakupannya peserta menguasai *platform* digital.
4. Keterbatasan ruang khusus yang mengakibatkan terjadi kesulitan di tahap pembangunan *co-working space* sehingga pelaksanaannya masih mengikuti di kantor kecamatan-kecamatan terdekat.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai *Collaborative Governance* pada Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat melalui aktivasi ruang kerja bersama dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan program aktivasi *co-working space* ini dilakukan dengan melalui pendekatan sinergitas antar *stakeholders* atau *collaborative governance* dengan adanya tindakan kolaboratif *penta-helix* yang melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari:
 - a) Akademisi, terdiri dari mahasiswa dan dosen perguruan tinggi di Kota Bandung,
 - b) Pemerintah, terdiri dari perangkat daerah kota, kecamatan hingga tingkat kelurahan,
 - c) Pebisnis, berupa pelaku bisnis di pihak swasta, pelaku usaha menengah ke atas dan UMKM, sentra IKM dan inkubator-inkubator bisnis,
 - d) Komunitas, terdiri dari lembaga masyarakat di setiap kecamatan atau kelurahan serta komunitas-komunitas lainnya yang terdapat di Kota Bandung,
 - e) Media, memanfaatkan media sosial dan media massa dari para pemangku kepentingan baik secara individu maupun lembaga
- 2) Pengembangan aktivasi Ruang Kerja Bersama melalui 3 tahapan diantaranya yaitu:
 - a) Tahap persemaian, tahap penumbuhan program-program dan pengenalan minat kewirausahaan, pembangkitan minat sebagai awal penumbuhan unit-unit usaha baru.
 - b) Tahap penumbuhan kewirausahaan, terdiri dari adanya upaya pengenalan dunia usaha, penumbuhan rintisan usaha baru hingga pematapan usaha yang diselaraskan dengan kolaborasi usaha anak muda dengan masyarakat lokal di wilayahnya.
 - c) Tahap pematapan dan akselerasi, tahapan mengkoneksikan melalui tindakan kolaborasi dengan inkubator bisnis maupun Ruang Kerja Bersama yang telah tumbuh di kota-kota besar terutama di Kota Bandung. Melalui

untuk menyebarluaskan informasi sebagai wadah sosialisasi terkait Ruang Kerja Bersama atau *co-working space*.

kerjasama kolaboratif yang dibangun untuk dapat mengakselerasi usaha-usaha yang tumbuh di Ruang Kerja Bersama (*co-working space*) di setiap kecamatan.

- 3) Hambatan-hambatan yang masih ditemui saat implementasi di lapangan seperti kekurangan dari hal teknis pelaksanaan, pendanaan, keterbatasan ruang hingga pemetaan wilayah sasaran menjadi hal yang perlu dibenahi.

2. Saran

Adapun sekiranya saran yang akan penulis kemukakan terkait dengan *Collaborative Governance* Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat di Kota Bandung yaitu:

- 1) Melakukan kajian pemetaan secara mendalam di setiap wilayah kecamatan di Kota Bandung untuk memetakan potensi di setiap wilayah dan memetakan kondisi geografis dan kependudukannya dengan tujuan melihat angka usia produktif untuk kemudian dapat diberdayakan secara optimal melalui Ruang Kerja Bersama. Pemetaan ini perlu adanya koordinasi secara sinergis dengan lembaga pusat data seperti Badan Pusat Statistik serta instansi pemerintah kecamatan dan kelurahan.

- 2) Mendorong adanya skema pendanaan terbaru yang memungkinkan tidak adanya kebergantungan kepada penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah dan terlalu mengandalkan dana *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan. Misalnya dengan skema pendanaan melalui *Public Private Partnership* (PPP) dengan harapan adanya perjanjian jangka panjang ataupun investasi oleh sektor bisnis untuk mengembangkan *co-working space* secara berkelanjutan.

- 3) Mendorong teknis pendampingan kepada peserta aktivasi *co-working space* agar lebih adaptif menyesuaikan kondisi ditengah situasi ketidakpastian dan inklusifitas.

- 4) Menjalin kolaborasi berkelanjutan dengan *stakeholder* terkait penyediaan fasilitas ruang kerja bersama melalui pemanfaatan fasilitas publik yang sudah ada namun belum terpakai secara optimal seperti bekas bangunan gedung, pasar, lahan kosong untuk dialihfungsikan menjadi Ruang Kerja usaha lokal dengan jaringan *e-commerce* baik nasional maupun internasional

Daftar Pustaka

A. Buku

- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Thoha, M. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Dokumen

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung (RPJMD) 2018-2023.
- Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung 2018-2023.

Laporan Kajian Pemetaan Potensi *Co-Working Space* di 30 Kecamatan se-Kota Bandung 2019.

C. Sumber Lain

- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)* (Doctoral dissertation, Universitas

Airlangga). Diunduh pada tanggal 6 September 2021 pukul 19.40.

- Irawan, D. (2017). *Collaborative governance* (studi deskriptif proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di kota surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12. Diunduh pada tanggal 6 September 2021 pukul 19.55.

- Ayu, S. K. A. (2021). *Analisis Collaborative Governance Regime Dalam Kebijakan Tata Ruang Dan Wilayah Di Kawasan Malang Raya* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). Diunduh pada tanggal 6 September 2021 pukul 18.45.

Humas Kota Bandung. 11 Kecamatan Siap Aktivasi Co-Working Space dalam <https://humas.bandung.go.id/ayanan/11-kecamatan-siap-aktivasi-co-working-space> diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 17.15.

Urbanasia. Bakal Ada Coworking Space Terbuka di 11 Kecamatan Bandung dalam <https://www.urbanasia.com/bakal-ada-coworking-space-terbuka-di-11-kecamatan-bandung-U4553> diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 17.20.

